WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA RUKUN TETANGGA (RT), RUKUN WARGA (RW), DAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) SE-KOTA SALATIGA TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat di tingkat Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), Pemerintah Kota Salatiga melalui APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 telah menyediakan dana bantuan keuangan kepada Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaan pemberian bantuan keuangan dapat berjalan tertib dan tepat sasaran perlu diatur dalam pedoman pelaksanaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) se-Kota Salatiga Tahun 2009.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3) ;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9) ;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12) ;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 1) ;
10. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 18 Seri D) ;
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 50) ;
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA RUKUN TETANGGA (RT), RUKUN WARGA (RW), DAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) SE-KOTA SALATIGA TAHUN 2009.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga,
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.

4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Salatiga.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
7. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW, adalah RW dalam wilayah Kota Salatiga.
8. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat dengan RT, adalah RT dalam wilayah Kota Salatiga.
9. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat PKK, adalah PKK pada masing-masing RT dan RW dalam wilayah Kota Salatiga.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kota Salatiga.
11. Bantuan Keuangan adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada RT, RW dan PKK.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Bantuan keuangan terdiri dari :
   a. bantuan kelengkapan administrasi bagi RT, RW, dan PKK ; dan
   b. insentif bagi Ketua RT dan Ketua RW.
(2) Bantuan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi RT, RW, dan PKK.
(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan sebagai wujud penghargaan kepada Ketua RT dan Ketua RW atas tanggung jawab yang diembannya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
(4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB III
BESARNYA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

(1) Besarnya bantuan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
   a. bagi RT dan RW sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ; dan
   b. bagi Kelompok PKK sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
(2) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk masing-masing Ketua RT dan Ketua RW.

Pasal 4

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 5 % (lima per seratus).

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Pengajuan

Pasal 5

(1) Camat mengajukan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Walikota melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

(2) Pengajuan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan daftar nama Ketua RT, Ketua RW, wilayah RT / RW dan ada / tidaknya PKK tingkat RT / RW pada masing-masing Kelurahan.

Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 6

(1) Walikota melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan menyerahkan Bantuan Keuangan kepada Camat.

(2) Camat menyalurkan Bantuan Keuangan kepada Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) se-Kota Salatiga Tahun 2009 berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 7

(1) Hasil penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), wajib dilaporkan oleh Camat kepada Walikota Salatiga melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa daftar penerimaan bantuan kelengkapan administrasi dan daftar penerimaan insentif yang ditandatangani oleh Ketua RT dan Ketua RW.

(3) Daftar penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2009.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Bagi RT dan RW yang terbukti menyalahgunakan bantuan keuangan tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka akan dipertimbangkan untuk tidak diberikan pada tahun berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 27-5-2009

WALIKOTA SALATIGA,

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 27-5-2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2009 NOMOR 23